

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR UNGGULAN EKONOMI KEPULAUAN DI INDONESIA

Made Sinthya Aryasthini Mahaendrayasa¹

Ni Nyoman Reni Suasih²

I Made Endra Kartika Yudha³

1,2,3

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia memiliki 16.056 pulau, dimana enam juta km persegi wilayah Indonesia adalah laut. Provinsi kepulauan adalah provinsi yang memiliki karakteristik geografis dengan luas lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial-budaya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa wilayah pulau rawan masalah konektivitas dan pasokan yang terbatas. Terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berbagai pembatasan diyakini juga mempengaruhi perekonomian nusantara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Nusantara, menganalisis sektor dasar dan non basis, serta perubahan atau pergeseran dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi provinsi kepulauan di Indonesia, dengan membandingkan kondisi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Data yang dianalisis adalah data sekunder yaitu PDRB Indonesia dan PDRB daerah kepulauan di Indonesia tahun 2018-2021 yaitu berdasarkan lapangan usaha (Berdasarkan harga konstan 2010). Periode data dipilih dengan pertimbangan sebelum dan selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Klassen Typology. Selain itu, analisis SWOT perekonomian daerah kepulauan di Indonesia juga dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka. Hasil kajian ini sangat penting dan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam pembangunan dan penguatan ekonomi serta sektor unggulan di provinsi kepulauan.

Kata kunci: *wilayah kepulauan, kondisi ekonomi, sektor unggulan, pandemi COVID-19*

ABSTRACT

Indonesia has 16,056 islands, of which six million square kilometers of Indonesia's territory is sea. An archipelagic province is a province that has geographical characteristics with an ocean area wider than the mainland in which there are islands that form a group of islands so that they become a geographical and socio-cultural unit. Some of the results of previous studies stated that island areas are prone to connectivity problems and limited supplies. The occurrence of the COVID-19 pandemic which has resulted in various restrictions is believed to have also affected the archipelago's economy. The purpose of this study is to analyze the growth classification of the economic sector in the archipelago, analyze basic and non-base sectors, as well as changes or shifts and competitive advantages in the economic sectors of archipelagic provinces in Indonesia, by comparing conditions before and during the COVID-19 pandemic. The

data analyzed is secondary data, namely the GRDP of Indonesia and the GRDP of the archipelago in Indonesia in 2018-2021, namely based on business fields (Based on 2010 constant prices). The data period was selected with consideration before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Analysis was performed using Location Quotient (LQ) analysis and Klassen Typology analysis. In addition, a SWOT analysis of the economics of the archipelago in Indonesia was also carried out through a documentation study and literature review. The results of this study are very important and can be used as a reference for the government to formulate policies in the development and strengthening of the economy and leading sectors in archipelagic provinces.

keyword: *island regions, economic conditions, leading sectors, COVID-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 16.056 pulau yang telah diakui oleh PBB (Prasetya, 2017), sehingga wajar jika Indonesia kemudian dijuluki sebagai negara kepulauan (Pandapotan et al., 2019). Beberapa provinsi di Indonesia memang didominasi oleh wilayah perairan sehingga berkembang pula istilah kawasan kepulauan. Wilayah kepulauan dapat diartikan sebagai provinsi dengan wilayah laut yang lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratan (Suawa, 2018). Hingga saat ini di Indonesia setidaknya terdapat delapan daerah otonom yang menganggap diri sebagai daerah/daerah kepulauan, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara (Puspitawati, 2020).

Kebijakan pembangunan tersebut menggariskan tiga dimensi pembangunan sebagai strategi untuk mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya adalah dimensi pemerataan dan kewilayahan, khususnya di daerah pinggiran dan luar Jawa, termasuk beberapa wilayah pulau. Pasal 14 RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi wilayah kepulauan dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam gugusan pulau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan keseimbangan antar pulau. mengelompokkan daerah sebagai satu unit ekonomi, tetapi dengan melihat permasalahan yang menonjol di wilayah kepulauan. seperti belum adanya regulasi yang mendasari pengembangan wilayah kepulauan,

keterbatasan infrastruktur, dan transportasi yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam (Suawa, 2018).

Kondisi geografis nusantara disinyalir menjadi salah satu kendala pembangunan, selain kendala sumber pendanaan dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan (Ginting, 2013). Di sisi lain, wilayah kepulauan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama di bidang pariwisata, perdagangan, dan sektor lain yang berbasis kelautan dan perikanan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi maritim di berbagai bidang. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan letak teritorialnya yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga merupakan kawasan penghubung antar negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, serta Asia Selatan. Posisi geostrategis dan geopolitik ini memberikan Indonesia peluang tidak hanya sebagai jalur ekonomi global tetapi juga sebagai jalur keamanan maritim internasional. Maka sangat logis jika Presiden Joko Widodo saat itu merancang gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia (Yudilla dan Amri, 2020).

Potret pembangunan kawasan kepulauan menjadi relevan dengan diperkenalkannya konsep 'poros maritim' oleh Presiden Joko Widodo. Dimana konsep poros maritim dalam penerapannya menekankan konektivitas antar pulau di Indonesia melalui industri perkapalan dan pelayaran (Puspitawati, 2020). Konektivitas tercermin dalam mobilitas orang dan barang/jasa. Namun, situasi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan pergerakan ditengarai berdampak pada aktivitas dan konektivitas tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Nusantara. Selain itu juga menganalisis sektor basis dan non basis, serta perubahan atau pergeseran dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi kepulauan di Indonesia, dengan membandingkan kondisi sebelum dan selama pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Nusantara (Analisis LQ)

Tabel berikut menyajikan rangkuman hasil analisis LQ masing-masing sektor di nusantara di Indonesia yang membandingkan data sebelum pandemi dan selama pandemi COVID-19.

Tabel 3. Nilai LQ Tiap Sektor di Wilayah Kepulauan di Indonesia

No.	Sektor	LQ. Nilai		Kriteria	Keterangan
		Sebelum Pandemi (2018-2019)	Masa Pandemi (2020-2021)		
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.86	1.80	Terkemuka	Menurun
2.	Pertambangan dan penggalian	2.80	2.69	Terkemuka	Menolak
3.	Industri manufaktur	0,30	0,34	Tidak memimpin	Meningkat
4.	Pengadaan listrik, gas	0,05	0,05	Tidak Memimpin	Cenderung Konstan
5.	Persediaan air	2.26	2.11	Terkemuka	Menurun
6.	Konstruksi	1.27	1.32	Terkemuka	Meningkat
7.	Perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor	0,96	0,97	Tidak Diunggulkan	Cenderung Konstan
8.	Transportasi dan pergudangan	1.12	1.19	Terkemuka	Meningkatkan
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,19	0,19	Non-	Cenderung Konstan
10.	Informasi dan Komunikasi	0,47	0,43	Tidak Diunggulkan	Menurun
11.	Layanan keuangan	0,55	0,55	Tidak memimpin	Cenderung konstan
12.	Perumahan	0,51	0,49	Bukan	Menurun
13.	Layanan perusahaan	0,11	0,11	Bukan	Cenderung konstan
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	1,48	1,50	Terkemuka	Meningkatkan
15.	Layanan pendidikan	1.53	1.54	Terkemuka	Meningkatkan
16.	Pelayanan sosial pelayanan kesehatan dan pendidikan	0,84	0,78	Tidak Diunggulkan	Menurun
17.	Layanan Lainnya	0,77	0,74	Tidak Diunggulkan	Menurun

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa terdapat tujuh sektor unggulan atau sektor dasar ($LQ > 1$) di Nusantara, yaitu: (1) pertambangan dan penggalian; (2) persediaan air; (3) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (4) layanan pendidikan; (5) wajib administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial; persediaan air; (6) konstruksi; (7) transportasi dan pergudangan. Sedangkan sepuluh sektor lainnya memiliki nilai $LQ < 1$ dan bukan merupakan leading sector atau bukan merupakan base sector. Jika dilihat dari nilai LQ sebelum dan selama pandemi, diketahui ada tujuh sektor yang nilai LQ -nya mengalami penurunan, lima sektor cenderung konstan, dan lima sektor lainnya mengalami peningkatan.

Perubahan dan Keunggulan Kompetitif Sektor Ekonomi Nusantara (Analisis Tipologi Klassen)

Tabel 4 menyajikan posisi masing-masing daerah setelah dilakukan analisis Tipologi Klassen.

Tabel 4. Hasil Analisis Tipologi Klassen

Wilayah	Sebelum Pandemi						Pandemi					
	2018			2019			2020			2021		
	Pertumbuhan (%)	Pendapatan Perkapita (Juta Rp.)	Kriteria	Pertumbuhan (%)	Pendapatan Perkapita (Juta Rp.)	Kriteria	Pertumbuhan (%)	Pendapatan Perkapita (Juta Rp.)	Kriteria	Pertumbuhan (%)	Pendapatan Perkapita (Juta Rp.)	Kriteria
Kepulauan Bangka Belitung	4.5	12.666	Wilayah Tumbuh	3.3	12.959	Wilayah Tumbuh	-2.3	12.794	Wilayah Terbelakang	5.1	12.819	Wilayah Pertumbuhan Cepat
Kepulauan Riau	4.5	13.976	Wilayah Tumbuh	4.8	14.466	Wilayah Tumbuh	-3.8	14.209	Wilayah Terbelakang	3.4	14.122	Wilayah Tumbuh
Maluku	5.9	8.721	Wilayah Terbelakang	5.4	8.887	Wilayah Terbelakang	-0,9	8.732	Wilayah Tumbuh	3.0	8.770	Wilayah yang Relatif Tertinggal
Maluku Utara	7.9	7.980	Wilayah Terbelakang	6.2	8.308	Wilayah Terbelakang	5.4	8.032	Wilayah Tumbuh	16.4	8.140	Wilayah Terbelakang
Nusa Tenggara Barat	-4.5	10.284	Wilayah yang Relatif Tertinggal	3.9	10.640	Wilayah yang Relatif Tertinggal	-0,6	10.351	Wilayah Tumbuh	2.3	10.377	Wilayah yang Relatif Tertinggal
Nusa Tenggara Timur	5.1	7.566	Wilayah yang Relatif Tertinggal	5.2	7.769	Wilayah Terbelakang	-0,8	7.598	Wilayah Tumbuh	2.5	7.554	Wilayah yang Relatif Tertinggal
Sulawesi Tenggara	6.4	9.262	Wilayah Terbelakang	6.5	9.436	Wilayah Terbelakang	-0,6	9.331	Wilayah Tumbuh	4.1	9.381	Wilayah Terbelakang
Sulawesi Utara	6.0	10.731	Wilayah Terbelakang	5.6	11.115	Wilayah Terbelakang	-1.0	10.791	Wilayah Tumbuh	4.2	10.882	Wilayah Terbelakang
INDONESIA	5.2	11.059		5.0	11.299		-2.1	11.013		3.7	11.156	

Analisis SWOT Sektor Perekonomian Daerah Kepulauan di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan pendekatan *literature review*. Faktor internal dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan.

Tabel 5. Rangkuman Analisis SWOT Sektor Ekonomi Nusantara di Indonesia

	<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki wilayah negara yang luas (baik darat maupun laut) - Memiliki banyak sumber daya manusia dengan berbagai adat budaya - Memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pendapatan yang tidak merata - Sumber daya alam yang melimpah belum dikelola secara optimal - Tingkat korupsi yang tinggi - Belum ada regulasi yang efektif untuk masalah makro di Nusantara - Biaya produksi tinggi - Pertahanan daerah tidak optimal
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim - Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia - Sektor kelautan dapat dikembangkan untuk mendukung sektor lain, seperti pariwisata, perikanan, perdagangan 	<p>Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan upaya pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya alam - Melakukan reformasi birokrasi untuk mendorong investasi di 	<p>Strategi WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencari pendanaan untuk pembangunan wilayah kepulauan - Menetapkan peraturan yang mencakup pembangunan wilayah kepulauan - Memperkuat pertahanan wilayah laut - Membangun infrastruktur yang dapat mendukung distribusi barang/jasa di
<p>Ancaman kepulauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keresahan sosial dan disintegrasi bangsa karena pengaruh asing - Potensi pencurian sumber daya alam, terutama dari pihak asing 	<p>Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat karakter bangsa Indonesia - Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara potensi sumber daya alam terutama dari pihak asing secara illegal 	<p>Strategi WT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan alokasi dana untuk pengawasan laut dan mencegah pencurian sumber daya alam

REFERENSI

- Basuki, AT, Gayatri, U. (2009). Penetapan Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* , 10(1), 34-50.
- Ginting, AM (2018). Hambatan Pembangunan Provinsi Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Politik* , 4(1), 49-75.
- Jumiyanti , KR (2018). Analisis Location Quotient Dalam Menentukan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Kajian Pembangunan Gorontalo* , 1(1), 1-15.
- Pandapotan, I., Subhilhaar, Kusmanto, H. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 11(1), 149-156.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12290>
- Prasetya, E. (2017). *Dari 17.504 pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi oleh PBB* . Tersedia di: <https://www.merdeka.com/events/dari-17504-island-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>
- Puspitawati, D. (2020). Pengembangan Wilayah Kepulauan Berbasis Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan dan Peluang Dalam Menyeimbangkan Pembiayaan Daerah. *Pembangunan Hukum Lingkungan*, 4(2), 251-263.
<http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107>
- Konvensi PBB tentang Hukum Laut. (1982). Tersedia di: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Sari, NR, Pujiyono, A. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*, 2(3), 1-15.
- Suawa, JJ (2018). Pembangunan Wilayah Nusantara untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Riset Lemhanas*, Edisi 35 September 2018.
- Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., Wilandari , Y. (2013). Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRS. *Jurnal Gaussian*, 2(3), 219-228.
- Yudilla, A., Amri, P. (2020). Analisis SWOT Kebijakan Poros Maritim Dunia di Wilayah Kepulauan Riau. *Negara-bangsa: Jurnal Studi Internasional* , 3(2), 230-240.